



Teori Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Herlina Wati^{1),a)}, Lisa Yuni Lestari^{2),b)}, Binti Nur Asiyah^{3),c)}, Mashudi^{4),d)}

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia

Herlinasofi70@gmail.com^{a)}, lisayuni026@gmail.com^{b)}, binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id^{c)}, mashudi_stain@yahoo.co.id^{d)}

ABSTRACT

The Blue Economy is one of the drivers of sustainable economic development. This is very clear from its dominant involvement and can help the economy of the Pesistit community while maintaining marine resources without causing damage. The contribution of the blue economy is in accordance with the Islamic economic concept which has the principles of justice, sustainability and sufficiency. This research aims to examine how the blue economy can be used to improve the community's economy. This research uses qualitative methods. The data used comes from various sources, namely books, journals, news sites, articles, websites and e-books. The concept of Islamic Economics is in line with the implementation of the Blue Economy which emphasizes justice, care and environmental sustainability when utilizing marine resources without exploitation or environmental damage.

Keywords: *Blue Economy; Islamic Economy; Maritime Affairs; Sustainability*

ABSTRAK

Ekonomi Biru merupakan salah satu penggerak pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Hal ini sangat terlihat jelas dari keterlibatannya yang begitu dominan dan dapat membantu perekonomian masyarakat pesisir dengan tetap menjaga sumber daya laut tanpa melakukan kerusakan. Kontirbusi ekonomi biru sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang berprinsip keadilan, berkelanjutan, dan berkecukupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ekonomi biru dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam penelitian ini menngunakan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, situs berita, artikel, website serta e-book. Konsep Ekonomi Islam sejalan dengan implementasi Ekonomi Biru yang menekankan pada Keadilan, kepedulian dan kelestarian lingkungan saat memanfaatkan sumber daya laut tanpa mengksplorasi atau merusak lingkungan.

Kata Kunci: *Ekonomi Biru; Ekonomi Islam; Kelautan; Keberlanjutan*

PENDAHULUAN

Ekonomi maritim memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global, karena laut berfungsi sebagai sarana utama bagi perdagangan internasional. Selain itu, pengelolaan sumber daya kelautan juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi negara.(Erianto et al., 2024) Lokasi geografis Indonesia yang berada di titik pertemuan jalur transportasi global memberikan nilai strategis yang signifikan, baik dalam konteks hubungan internasional maupun pembangunan nasional. Terbentang di antara Asia serta dan Australia dan diapit oleh Samudra Pasific dan Samudra Hindia, perairan Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran utama yang berperan penting pada aktivitas mobilitas internasional serta perdagangan.(Eko & Duha, 2022)

Sebagai salah satu daerah dengan kepulauan terbesar dunia, Indonesia memiliki proporsi luas daratan sekitar sepertiga dari total wilayahnya, sementara dua pertiganya merupakan lautan. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia kaya akan beragam potensi alam. Negara ini juga merupakan kawasan maritim Paling luas di kawasan Asia dan menjadi jalur persilangan kapal pesiar, baik dari Barat ke Timur maupun sebaliknya, yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Setiap tahunnya, sekitar 5.000 kapal pesiar berlabuh di wilayah Indonesia.(Erianto et al., 2024) Sebagian besar wilayah Indonesia, sekitar 70%, terdiri dari perairan. Mengacu pada data Referensi Nasional yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pemetaan dan penyediaan informasi geospasial dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut menunjukkan bahwa luas keseluruhan wilayah perairan Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta km². Angka ini merupakan bagian dari total luas wilayah daratan dan perairan Indonesia yang mencapai 8,3 juta km².(Science, 2020)

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam. Sumber daya alam ini perlu dilestarikan demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Potensi kemaritiman Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa contoh potensi ekonomi maritim Indonesia mencakup berbagai sektor, seperti perikanan, ekosistem terumbu karang, hutan bakau, cadangan minyak dan gas bumi, mineral, budidaya rumput laut, transportasi berbasis laut, keindahan kawasan pantai, taman bawah laut, serta aspek pertahanan wilayah perairan. Allah

menciptakan bumi beserta seluruh isinya untuk dihuni oleh manusia, dan tidak ada satupun yang diciptakan di dunia ini tanpa tujuan dan manfaat, sebagaimana yang tertulis dalam Qur'an Surat Al-Anbiya Ayat 19.

وَلَا يَسْتَخِرُونَ عِبادِهِ عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ لَا عِنْدَهُ وَمَنْ وَالْأَرْضُ السَّمَوَاتُ فِي مَنْ وَلَهُ ١٩

Artinya: "Hanya milik-Nya siapa yang di langit dan di bumi. (Malaikat-malaikat) yang di sisi-Nya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tidak (pula) merasa lelah.".

Dalam Tafsir as-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi tanpa tujuan atau secara sembarangan. Sebaliknya, Allah menciptakannya dengan penuh kebenaran dan untuk tujuan yang mulia, yaitu agar para hamba dapat melihat bukti bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Agung, Maha Mengatur, Maha Bijaksana, serta Maha Pengasih dan Penyayang. Allah memiliki segala kesempurnaan, kehormatan, kebenaran dalam Firman-Nya, dan kejujuran para utusan-Nya dalam menyampaikan wahyu (tafsirweb.com).

Indonesia telah mengadopsi kebijakan terkait ekonomi biru yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Kelautan, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan). Kebijakan ini dijadikan dasar dalam mengatur Pengembangan sektor kelautan secara maksimal serta terintegrasi, memberikan kepastian hukum, serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan.(Setyawati et al., 2021)

Konsep ekonomi biru merupakan pendekatan Pendekatan pembangunan yang tidak mengandalkan eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pada penerapan praktik ekonomi jangka panjang yang mendorong perekonomian dengan emisi karbon yang rendah.(Setyawati et al., 2021) Pembangunan ekonomi biru dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu integrasi antara pembangunan daratan dan kelautan, pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah serta daya saing produk melalui inovasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan sejahtera.(Setyawati et al., 2021)

Pelaksanaan ekonomi biru memberikan kemanfaatan untuk wilayah yang memiliki potensi besar di sektor maritim. Ide ini dapat mengatasi keterbatasan wilayah daratan dalam

mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir. Upaya pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam kebijakan tersebut, ekonomi biru dimasukkan sebagai bagian dari kebijakan kelautan Indonesia, selain kebijakan yang Berorientasi pada wawasan nusantara, pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan yang terkoordinasi dan transparan, partisipasi aktif, kesetaraan, serta pemerataan.(Setyawati et al., 2021)

Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti overfishing, Penangkapan ikan secara merusak dan penangkapan ikan ilegal sering terjadi di kawasan ini dan menjadi ancaman serius terhadap kelestarian alam. Untuk mengatasi masalah tersebut, program ekonomi biru menjadi solusi terbaik yang mampu menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi kelautan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, Konsep ekonomi biru bukan hanya menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi, namun juga menekankan pentingnya pelestarian ekosistem laut dan pesisir Untuk memastikan keuntungan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan ekonomi biru yang berjangka panjang, tiap-tiap negara dianjurkan mencari metode yang tepat dalam menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya maritim sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat bagi lingkungan.(Olteanu & Stinga, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan konsep ekonomi biru. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam bagaimana kedua konsep tersebut dapat terintegrasi dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mendorong penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Ada beberapa prinsip kunci yang relevan dalam konteks ekonomi biru antara lain; Pertama, *Istidama* (keberlanjutan) yaitu segala sesuatu yang ada di bumi adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Prinsip ini mengacu pada konsep '*mizan*' atau keseimbangan yang disebutkan dalam Al-Quran (QS. Ar-Rahman: 7-9). Kedua, Prinsip keadilan dalam Islam mencakup distribusi sumber daya yang adil dan merata. Tidak hanya segelintir pihak yang berhak menikmati kekayaan laut, tetapi juga masyarakat pesisir yang seringkali menjadi kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, syariah mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, misalnya dengan memberikan akses yang lebih besar kepada nelayan tradisional dan masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. Ketiga, *Al-Kifayah* (kecukupan), yaitu bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya alam. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan alam, termasuk laut, didistribusikan secara adil dan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.

Islam dengan tegas melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-A'raf (7:31), ketika Allah SWT berfirman:

"Wahai anak Adam, kenakanlah pakaian yang layak setiap kali memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan berlebihan, termasuk dalam mengeksplorasi sumber daya alam, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, perusakan ekosistem laut seperti pencemaran, penangkapan ikan secara berlebihan, serta penghancuran habitat laut merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam. Umat Islam didorong untuk menjauhi perilaku yang merusak lingkungan dan dianjurkan untuk menerapkan cara-cara yang mendukung keberlanjutan dan pelestarian ekosistem laut.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya berbagi manfaat dari sumber daya alam untuk kepentingan bersama. Dalam Islam, eksplorasi sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana dan tidak merusak. Berkaitan dengan ekonomi biru, Islam mendorong

adanya program pemberdayaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan inovasi dan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Zakat, wakaf, dan sedekah dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat pesisir ini. Sejalan dengan fakta yang dikemukakan oleh (Abrori & Kharis, 2022) bahwa pemberdayaan bisa dilakukan oleh BAZNAZ dengan dua pola yaitu memberikan insentif tunai berupa modal kerja setelah dilaksanakannya pelatihan atau pengadaan barang seperti alat untuk menunjang pekerjaan nelayan misalnya perahu, alat produksi garam, fasilitas wisata yang sesuai standar.

Menurut (Hayati & Soemitra, 2022) konsep ekonomi Islam melalui Zakat, wakaf, dan sedekah dekat maknanya dengan charity. Selain kepedulian dan cinta sesama manusia hal ini juga berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki. Adanya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusak nya sehingga sumber daya akan terus ada dari generasi saat ini menuju generasi di masa depan. Hal ini tentu saja dapat digunakan untuk meminimalisir masalah-masalah sosial seperti kemiskinan karena adanya sumber daya alam yang masih dimanfaatkan seperti potensi kelautan saat ini khususnya bagi masyarakat pesisir. Manfaat dari adanya Zakat, wakaf, maupun sedekah juga diperkuat oleh (Amirudin & Sabiq, 2021) bahwa Terdapat konsep ekonomi yang mendasar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dapat dicapai melalui mekanisme sharing atau berbagi. Salah satu tujuan ekonomi keadilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan fakir. Untuk jangka pendek ini dapat tercapai dengan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan dalam jangka panjang dengan memberikan pemberdayaan yang produktif untuk meningkatkan daya tahan ekonomi mereka.

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa zakat mempunyai fungsi untuk mengatasi kemiskinan maupun mengatasi masalah politik, sosial, dan kelestarian lingkungan. Dia memandang fungsi zakat lebih mengerucut untuk mengatasi permasalahan ekonomi (Zainudin, 2024). Penelitian dari (Anindita, S. F., & Sidiq, 2018) juga menjelaskan bahwa Zakat memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menyelesaikan masalah pembangunan utama seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan angka kelaparan. Undang-undang mengatur pengelolaan zakat karena potensi zakat adalah salah satu pranata keagamaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan

bagi masyarakat. Zakat dan Konsep keberlanjutan memiliki hubungan penting dan saling berkaitan, bukan hanya mengurangi kemiskinan namun juga dapat memberikan kesejahteraan. Ini karena SDGs memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang di setiap poinnya. Pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah jenis pembangunan negara yang mengutamakan lahan, kota, bisnis, dan ekonomi guna mencukupi yang dibutuhkan saat ini namun masih mempertahankan persaingan untuk masa mendatang (Putri et al., 2023).

Pengertian Blue Economy

Ekonomi Biru menekankan larangan terhadap praktik pemborosan yang menyebabkan limbah berlebih, sedangkan Ekonomi Hijau lebih berfokus pada upaya mengurangi polusi yang sudah ada. Perbedaan pendekatan ini menjadi pembeda utama antara kedua kebijakan ekonomi tersebut. Ekonomi Hijau adalah sebuah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus secara signifikan menekan risiko kerusakan lingkungan. Di sisi lain, Ekonomi Biru mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan lautan, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebijakan ekonomi berkelanjutan. Menurut *Common International Classification of Ecosystem Services* (CICES), lautan menyediakan berbagai jenis jasa yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: jasa penyediaan, jasa pengaturan dan pemeliharaan, serta jasa budaya.

Jasa penyediaan mencakup manfaat yang diperoleh langsung dari ekosistem, seperti air, mineral, dan energi. Jasa pengaturan dan pemeliharaan melibatkan manfaat dari proses ekosistem, seperti pengaturan iklim, penyerapan karbon, dan perlindungan wilayah pesisir. Sementara itu, jasa budaya mencakup pemanfaatan potensi lokasi wisata yang dimiliki oleh suatu negara.(Chanda & Ghosh, 2023) Penerapan aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Blue Economy dalam cakupan yang lebih luas memiliki potensi untuk:(Ma, 2024) 1) Mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan; 2) mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien tanpa bersifat eksplorasi berlebihan; dan 3) memanfaatkan limbah sebagai bahan baku untuk menciptakan nilai tambah.

Konsep Blue Economy dikembangkan sebagai respons terhadap masalah bahwa sistem ekonomi global saat ini cenderung mengeksplorasi dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ekonomi baru yang meniru fungsi ekosistem untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan mengembangkan usaha yang inventif dan kreatif, berdasarkan prinsip efisiensi alam tanpa pemborosan, konsep ini membuka peluang kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kreativitas dan inovasi.

Blue Economy juga dikembangkan sebagai respon terhadap kesadaran bahwa kegiatan ekonomi dapat dikelola dengan cara yang kreatif dan inovatif tanpa merusak lingkungan, yang seharusnya menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem dengan meminimalkan kerusakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh limbah dari industri atau rumah tangga, tetapi juga akibat eksplorasi sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung alam.

Ekonomi Biru adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, serta melindungi kelestarian ekosistem laut.(Prayuda & Sary, 2019) Pendekatan ini menitikberatkan pada signifikansi pengelolaan potensi kelautan yang Arif dan penuh tanggung jawab guna mengupayakan keberlanjutan di masa yang akan datang.

Komponen utama dari Ekonomi Biru mencakup perikanan yang berkelanjutan, yang mana eksplorasi pengelolaan sumber daya ikan dilakukan melalui cara yang tidak membahayakan ekosistem laut serta memelihara keseimbangan populasi ikan, yang esensial untuk menjamin ketersediaan ikan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Selain itu, pariwisata bahari yang memanfaatkan keindahan dan keunikan ekosistem laut, seperti terumbu karang, pantai, dan kehidupan laut lainnya, juga menjadi elemen penting dari konsep ini.(Kasus & Wisata, 2024)

Pariwisata bahari yang berkelanjutan memastikan bahwa kegiatan wisata tidak merusak lingkungan laut sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat setempat. Di samping itu, pemanfaatan energi terbarukan dari laut, seperti energi gelombang, pasang surut, dan angin lepas pantai, tidak hanya mengurangi ketergantungan

pada bahan bakar fosil tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.(Ma, 2024)

Kebijakan Ekonomi Biru Di Indonesia

Industri kelautan menjadi perhatian utama dalam konsep baru yang disebut Blue Economy. Untuk menuju yang hasil terbaik dalam pengembangannya, diperlukan tingkat inovasi yang tinggi. Dalam kerangka Ekonomi Biru, terdapat konsep Minapolitan, yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan melalui pendekatan dan sistem pengelolaan wilayah, sehingga dapat tumbuh dengan pesat layaknya sebuah kota. Beberapa variabel penerapan ekonomi biru di Indonesia antara lain adalah Inovasi dan Teknologi terkait pemanfaatan teknologi secara optimal, Keberlanjutan Ekosistem dan Lingkungan yang menekankan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta Kebijakan Pemerintah yang fokus pada kebijakan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Hati-hati dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alamnya, mengingat luasnya wilayah perairan serta melimpahnya kekayaan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya kelautan Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat signifikan bagi negara. Untuk mewujudkan tujuan dari konsep Ekonomi Biru secara optimal, sangat penting bagi masyarakat di wilayah pesisir untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai cara penerapan konsep tersebut.(Gatot & Senayan, 2018)

Selama Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo, implementasi Program Ekonomi Biru di Indonesia lebih ditekankan pada sektor industri perikanan serta potensi Pengelolaan ekosistem laut lainnya.(Ma, 2024) Ekonomi Biru, yang menjadi landasan bagi pola pertumbuhan ekonomi kelautan, menitikberatkan pada pengelolaan untuk meningkatkan Ekonomi suatu negara serta meliputi pemanfaatan Sumber daya kelautan yang bersifat alami dan berbasis kelautan., Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang bijaksana memutuskan menjadikan Indonesia bagian dari anggota APEC, Dengan tujuan untuk mendukung penerapan kebijakan Ekonomi Biru melalui berbagai rangka kerja yang telah dipersiapkan, seperti Dukungan terhadap perdagangan, penghapusan hambatan, serta peningkatan investasi.

Pemerintah juga diharapkan untuk memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada masyarakat pesisir mengenai tata kelola sumber daya alam yang baik, pengelolaan

limbah yang minim, serta pemahaman yang jelas tentang penerapan Konsep Ekonomi Biru agar sasaran dari konsep ini dapat dicapai secara optimal dan efektif. Langkah itu dapat menjamin penerapan kebijakan tersebut secara nyata. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir, partisipasi aktif masyarakat pesisir sangat diperlukan. Mereka juga diharapkan mampu berpikir kritis dalam Mengurangi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga dapat menggunakan sumber daya kelautan secara lebih efisien dan berimbang.

Blue Economy dari Sudut Pandang Islam

Islam adalah memiliki cakupan yang luas dan berkaitan dengan semua aspek kehidupan, itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara yang berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan melindungi lingkungan. Dalam situasi seperti ini, ajaran Islam yang memfokuskan untuk keseimbangan, tanggung jawab, dan kedulian terhadap ciptaan Allah SWT dapat membantu menginterpretasikan ide tentang ekonomi biru atau blue economy (Ahmad Hery Sultoni, 2023). Ekonomi biru telah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir karena laut yang masih alami menyediakan lapangan pekerjaan dan makanan, menopang pertumbuhan ekonomi, memperbaiki iklim, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah pesisir (Abd. Rahim dkk, 2019).

Nilai-nilai dalam ekonomi Islam pada dasarnya memiliki keterkaitan yang harmonis, baik secara teori maupun praktik, dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Gagasan tentang manusia sebagai khalifah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan, bukan untuk mengeksplorasinya secara berlebihan. Selain itu, larangan terhadap perilaku konsumtif yang berlebihan dalam QS. Al-A'raf ayat 31 menekankan pentingnya keseimbangan dalam aktivitas konsumsi dan produksi. Di sisi lain, prinsip maslahah atau kemaslahatan umum mengarahkan proses pembangunan agar berfokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan seperti nelayan kecil dan perempuan yang tinggal di wilayah pesisir (Ferdaus et al., n.d.).

Salah satu prinsip utama Islam adalah konsep keseimbangan (al-mizan) dan keadilan (al-adl), di mana konsep ini harus diimplementasikan di setiap aspek kehidupan, yang mencakup manajemen sumber daya laut. Dalam QS Ar-Rahman Allah SWT

berfirman(55:7-9): “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan (al-mizan), agar kamu jangan melampaui batas tentang keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” Ayat ini menjelaskan bahwa orang Islam harus menjaga kelestarian alam dan mengelola sumber daya dengan adil, dengan tidak melakukan perusakan atau mengeksplorasi dan menggunakan dengan berlebihan. Dalam ekonomi biru, ini berarti melakukan pengelolaan terhadap laut dan sumber dayanya melalui cara yang tidak merusak atau berkelanjutan, untuk memastikan bahwa ekosistem laut tetap terjaga dan produktif untuk generasi berikutnya.

Dalam agama Islam, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah bahwa manusia merupakan wakil atau khalifah Allah di bumi (khilafah fil ard), dan mereka bertanggung jawab untuk melestarikan dan merawat ciptaan-Nya (2:30): “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Tugas moral dan spiritual khalifah terhadap umat Islam adalah menjaga lingkungan, termasuk laut dan sumber daya laut. Tugas ini sejalan dengan konsep ekonomi biru yaitu memfokuskan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang berarti pengembangan yang berkelanjutan, menjaga keanekaragaman sumber daya laut, dan pengembangan energi terbarukan dari laut.

Prinsip utama yang mendasari ekonomi Islam antara lain adalah keadilan ('adl). Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus diperlakukan secara adil, baik dalam kegiatan transaksi ekonomi maupun dalam distribusi kekayaan. Tidak seperti sistem ekonomi konvensional yang berfokus pada keuntungan semata, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta memastikan terciptanya keadilan sosial dan moral (Permana yoga, 2024). Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan yang seharusnya, tanpa ada yang lebih atau kurang. Dalam sistem sosialisme dan komunisme, negara memiliki otoritas untuk menetapkan keadilan tersebut, sedangkan dalam kapitalisme, otoritas ini berada pada individu. Di sisi lain, dalam sistem ekonomi Islam, penentuan keadilan merupakan kewenangan Tuhan(Permana yoga, 2024). Konsekuensi dari konsep ini dalam kehidupan sehari hari dapat menimbulkan perbedaan pandangan, terutama ketika prinsip keadilan ini diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk laut (Hermanto & Ilyas, 2021).

Salah satu bentuk implementasi nyata dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang selaras dengan semangat ekonomi biru adalah upaya menjaga laut dari eksloitasi berlebihan. Laut merupakan sumber daya publik (*public goods*) yang dalam Islam harus dikelola secara adil dan berkelanjutan, tidak hanya untuk keuntungan generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang. Eksloitasi berlebihan seperti penangkapan ikan yang tidak terkendali, penggunaan alat tangkap yang merusak, hingga pencemaran laut oleh industri, mencerminkan bentuk ketidakadilan ekologis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam kerangka ekonomi biru syariah, upaya menjaga laut dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal, wakaf produktif, dan lembaga keuangan syariah.

Islam tidak mengajarkan untuk melakukan perusakan sumber daya atau membuat kerusakan di bumi. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf (7:31): "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dalam situasi ini, ajaran Islam sangat bertentangan dengan eksloitasi sumber daya laut seperti pencemaran, overfishing, dan perusakan ekosistem laut. Umat Islam diminta untuk tidak melakukan kebiasaan yang merusak dan sebaliknya melakukan pengembangan strategi untuk menjaga kelestarian laut.

Menurut ajaran Islam, rahmatan lil 'alamin mencakup seluruh alam semesta. Diharapkan orang Islam menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada semua makhluk hidup, termasuk orang lain. Dalam konteks ekonomi biru, ini berarti melestarikan ekosistem laut yang sehat, dapat memberikan manfaat bagi manusia dan menjadi tempat tinggal bagi berbagai makhluk laut. Adanya ajaran Islam, masyarakat telah berperan penting dalam mengembangkan kelestarian laut dan sumber daya di dalamnya, serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi laut dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan yang generasi di masa mendatang tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem yang dikaruniakan dari Allah SWT.

Pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah komponen modal pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus berupaya untuk mempertahankan kualitas tiga pilar tersebut untuk mengembangkan pola kehidupan sosial yang seimbang. Jika suatu wilayah dibangun untuk industri, investor dan pemerintah harus mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan

potensi kerusakan lingkungan, misalnya penurunan kualitas air bersih dan rusaknya ekosistem maupun habitat keanekaragaman hayati (Bari & Sholihah, 2024). Dari sudut pandang Islam, ekonomi biru bukan hanya tentang keuntungan finansial tetapi juga tentang menjalankan amanah sebagai khalifah di Bumi dan menjaga ciptaan Allah dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Ekonomi Biru memiliki gagasan yang bagus tentang bagaimana mengimbangi ekonomi dan ekosistem. Untuk menjaga eksistensi lingkungan, tidak hanya merawat tetapi juga memanfaatkannya dengan bijak dapat membantu dan tidak merusak lingkungan usaha (Puspitasari et al., 2023).

Penetapan eksplorasi laut sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pembangunan Islam mencerminkan strategi optimalisasi sumber daya alam berbasis nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif. Eksplorasi sektor kelautan seperti perikanan, energi laut, migas lepas pantai, dan bioteknologi maritim berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil dari eksplorasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi kapital, tetapi juga harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk zakat dan sedekah. Kedua instrumen ini memiliki nilai instrumental penting sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, serta berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memperkuat struktur ekonomi umat (Pratiwi et al., 2023). Alokasi zakat dari sektor kelautan dapat diarahkan pada pemberdayaan nelayan miskin, pembangunan infrastruktur desa pesisir, penguatan ketahanan pangan laut, serta peningkatan literasi ekonomi syariah di kawasan pesisir. Di sisi lain, sedekah yang bersifat sukarela dapat melengkapi fungsi zakat dengan memberikan fleksibilitas pembiayaan sosial yang lebih luas, misalnya dalam merespons bencana laut atau krisis ekologi (Ainolyaqin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan sedekah bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga merupakan perangkat kebijakan sosial-fiskal Islam yang selaras dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam perlindungan harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Lebih lanjut, pemanfaatan zakat berbasis hasil eksplorasi laut juga didorong oleh perkembangan digitalisasi sistem pengelolaan zakat yang memungkinkan peningkatan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Rohmaniyah, 2022). Dengan demikian, zakat dan sedekah memiliki nilai strategis sebagai

instrumen kebijakan dalam menjembatani antara produktivitas ekonomi dan keadilan sosial dalam ekonomi pembangunan Islam.

Kebijakan eksplorasi laut dalam konteks pembangunan ekonomi Islam merupakan bagian dari strategi pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bertanggung jawab. Sebagai negara maritim dengan potensi kelautan yang sangat besar, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan eksploratif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam pandangan ekonomi Islam, eksplorasi sumber daya laut harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, kemaslahatan bersama, dan pelibatan komunitas lokal dalam rantai manfaatnya (Sari, 2023). Oleh karena itu, kebijakan eksplorasi laut perlu dirancang tidak hanya untuk mendorong investasi dan industri maritim, tetapi juga mengatur alokasi hasilnya agar dapat digunakan untuk kepentingan sosial, seperti melalui pendanaan berbasis zakat dan sedekah. Hal ini akan memperkuat fungsi sosial dari aktivitas ekonomi dan menghindari eksploitasi sumber daya yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

KESIMPULAN

Aplikasi teori ekonomi Islam ke dalam ekonomi biru adalah sebuah konsep ekonomi yang fokusnya pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, maslahah, dan penghindaran kerusakan lingkungan (al-fasad) sejalan dengan tujuan ekonomi biru untuk menjaga ekosistem laut. Penelitian ini menyelidiki bagaimana zakat, wakaf, dan mudharabah dapat membantu pembangunan ekonomi biru, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekonomi yang berfokus pada sumber daya laut. Ekonomi Islam dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kebercukupan sejalan dengan pembangunan bekelanjutan (Sustainable Goals) dengan memanfaatkan sumber daya laut yang melimpah untuk kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan tanpa melakukan perusakan lingkungan untuk meminimalisir kelangkaan.

Ekonomi Biru hadir untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai macam implementasinya. Pembiayaan dan kebijakan pemerintah untuk menunjang pengelolaan sumber daya laut agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sangat perlu dilakukan mengingat hal tersebut menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan

taraf hidup mereka. Implementasi yang baik dan sesuai dapat menghasilkan output yang baik dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahim dkk. (2019). *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. PT Nasya Expanding Management.
- Abrori, A., & Kharis, A. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 8(1), 102. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.13009>
- Ahmad Hery Sultoni. (2023). Sustainable Blue Economy Perspektif Al-Qur'an. *Jakarta: Publica Indonesia Utama*, 146.
- Ainolyaqin, A. Y. (2022). Filantropi Zakat Laziskaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 515. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4415>
- Amirudin & Sabiq. (2021). Peran Ziswaf dalam Meemulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 4093.
- Anindita, S. F., & Sidiq, S. (2018). Analisis potensi zakat dalam pencapaian SDGs di 34 provinsi di Indonesia. *Southeast Asia International Islamic Philanthropy Conference*, 1(10), 3060.
- Bari, A., & Sholihah, S. (2024). Analisis Sustainable Development Goals (SDGs) Filantropi Cilik Di LAZISMU Pamekasan. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita* ..., 09(01), 164–174. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1297>
- Chanda, A., & Ghosh, T. (2023). *The Blue Economy* (Issue October 2022). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-96519-8>
- Eko, G., & Duha, S. J. (2022). Blue Economy Indonesia to Increase National Income through the Indian Ocean Rim Association (IORA) in the Order to Empower the World Maritime Axis and Strengthen State Defense. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 7(2), 514–527.
- Erianto, R., Hasibuan, I. M., & Batubara, M. (2024). *Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah*. 09(01). <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1143>
- Ferdaus, N. N., Sakina, S. L., Rispaawati, D., Jumaedi, M., Mataram, U., Studi, P., Kelautan, I., Pertanian, F., Mataram, U., Manajemen, P. S., Mataram, U., Syariah, E., & Halal, P. (n.d.). *BLUE ECONOMY DALAM LENSA EKONOMI SYARIAH: PELUANG*. 4(1), 273–285.
- Gatot, J., & Senayan, S. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN*. 9(2).
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2), 109–121. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>
- Hermanto, & Ilyas, R. (2021). Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 297–316. <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.2201>
- Kasus, S., & Wisata, K. (2024). *Peran Ekonomi Biru Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi*. 2(3).

- Ma, F. (2024). *Peluang Pariwisata Karimunjawa Dalam Perspektif Blue Economy*. 5(2), 72–80.
- Olteanu, A., & Stinga, V. (2019). *Communicative Action & Transdisciplinarity in the Ethical Society The Economic Impact of the Blue Economy The Economic Impact of the Blue Economy*. November 2018, 190–203.
- Permana yoga, F. L. N. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(Table 10), 80–94.
- Pratiwi, N. R., Indrawati, N. K., & Wijayanti, R. (2023). Biased Behavior in Borrowing from Loan Sharks. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(1), 31–44. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss1.art3>.
- Prayuda, R., & Sary, V. (2019). *ECONOMY TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences*. 3(2), 46–64.
- Puspitasari, D., Chasanah, A. N., & Wardhani, M. F. (2023). Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Untuk Perikanan Berkelanjutan Berbasis Konsep Blue Economy. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 215–225. <https://doi.org/10.32534/jv.v18i2.3836>.
- Putri, S., Sudiarti, S., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3058–3069. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3757>.
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>.
- Sari, D. L. I. (2023). Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , 18(2), 406–423.
- Science, E. (2020). *Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia*. 0–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012051>.
- Setyawati, L. R., Cahya, D. D., Novarianti, A. D., Said, B. D., Nasional, F. K., Putra, U. N., & Pesisir, K. M. (2021). *Implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di kota sabang*. 9(4), 178–185.
- Zainudin, M. (2024). Filantropi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat melalui Ziswaf. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4089–4101. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.860>.